



PUTUSAN

Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tgl.Lahir: Kampung Baru/12 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Tergugat, Tempat/Tgl.Lahir: Payakumbuh/10 November 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2018, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.LK, tanggal 21 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 1994 di KUA. Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/24/XI/1994 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kapur IX, tanggal 24 November 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kapur IX selama 17

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No.0158 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 19 April 1995;
- 2.2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 1997;
- 2.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal 06 Oktober 2013;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun **sejak tahun 2010** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 3.1. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang ke rumah, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
- 3.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat, sehingga Penggugat dan orang tua Penggugatlah yang berusaha untuk mencukupinya;
- 3.3. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah, dan pulanginya sering larut malam, dan ternyata ia bermain judi bersama teman-temannya;
- 3.4. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama DWI tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga tempat tinggal Penggugat, dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

1. Bahwa permasalahan terakhir terjadi **pada bulan Mei 2017**, disebabkan perempuan yang bernama DWI tersebut datang ke tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat untuk menemui Tergugat, dan perempuan tersebut mengaku sebagai istri Tergugat, dan Penggugatpun menanyakan kebenaran hal tersebut langsung kepada Tergugat, dan Tergugatpun mengakuinya, sehingga terjadilah pertengkaran;

2. Bahwa akibat kejadian pada poin 5 (lima) diatas, hingga sekarang kurang lebih 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No.0158 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugatpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat yang telah tertera pada identitas Penggugat di atas, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak pernah melakukan upaya damai;

6. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No.0158 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/24/XI/1994 tanggal 24 November 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah kakak sepupu Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2010, tidak harmonis dan rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah: Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah keluarga, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No.0158 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk disatukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik ipar Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 24 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2010, tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut, karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa usaha untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No.0158 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin menceraikan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan lebih dahulu tentang kompetensi mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *in casu* adalah gugatan perceraian sebagaimana tercakup dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara absolut berada pada peradilan agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan Penggugat pada Pengadilan Agama Limapuluh Kota yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatannya dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No.0158 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan tidak pernah hadir, tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap ke persidangan. Ketidakhadiran itu ternyata telah tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat selama persidangan. Akan tetapi, usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBG menyatakan sebagai berikut;

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut maka perkara *in casu* dapat diperiksa, diadili, dan bahkan dikabulkan sepanjang gugatan *a quo* telah mempunyai dasar hukum atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat Tergugat selaku suami Penggugat yang menikah pada tanggal 13 November 1994, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:184/24/XI/1994 tanggal 24 November 1994, mohon diputuskan ikatan

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No.0158 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya karena sejak tahun **2010** Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak **bulan Mei 2017** atau setidaknya selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa pernah kembali lagi sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban semestinya suami isteri. Kondisi dan kausa secara lengkap sebagaimana termuat di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P berkualifikasi akta otentik oleh karena itu juga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum adalah suami isteri. Maka dari itu pula Penggugat dengan Tergugat telah benar memiliki, kedudukan hukum, *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka persidangan maka syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi di persidangan didasarkan pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya maka syarat materil kesaksian dinyatakan pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi *in casu* ternyata bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakan antara satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah bernilai pembuktian terhadap dalil-dalil Penggugat sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis telah menemukan sejumlah fakta sebagai berikut;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No.0158 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 13 November 1994, bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setidaknya sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi bagaimana harusnya suami isteri dan selama itu pula nafkah tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa usaha untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Majelis berkesimpulan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri senyatanya rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berujung pada pisah tempat kediaman serta tidak adanya nafkah setidaknya telah 10 (sepuluh) bulan berlangsung hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dikategorikan lagi sebagai rumah tangga yang baik, aman, rukun, harmonis, dan apalagi bahagia sehingga beralasan untuk tetap mempertahankan kelangsungannya. Ikatan lahir batin sebagai substansi dasar keberlangsungan rumah tangga telah hilang dalam diri masing-masing pihak, Penggugat maupun Tergugat. Tidak pernah ada hidup bersama dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan termasuk nafkah telah sangat membuktikan hilangnya ikatan lahir batin dimaksud secara timbal balik. Kondisi

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No.0158 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah sangat kontradiktif, berlawanan tajam dengan arti, kehendak maupun tujuan apalagi hakikat sesungguhnya hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا
إليهاوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan:Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan yang telah dikemukakan maka Penggugat dengan Tergugat tidak beralasan lagi untuk dikualifikasikan ke kategori suami isteri yang tetap hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan itu maka substansi pasal di atas telah dapat diterapkan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No.0158 /Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi yuridis di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum atau alasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Pasal 119 ayat (1) dan (2);

- (1) Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;
- (2) Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah;
 - a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
 - b. talak dengan tebusan atau *khuluk*;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat telah dikabulkan maka berdasarkan pasal di atas Majelis Hakim *in casu* akan menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Dan disebabkan talak ini menurut hukum untuk yang pertama kali selama dalam peristiwa hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka talak yang akan dijatuhkan dimaksud adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No.0158 /Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *in casu* tercakup dalam bidang perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara *a quo* sejumlah **Rp411.000,00** (empat ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh **Firdaus, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH**, dan **Dr. Muhammad Fauzan, S.HI. M.A** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Faizal Roza, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No.0158 /Pdt.G/2018/PA.LK



putusan.mahkamahagung.go.id